



Judul : Parpol Belum Satu Suara  
Tanggal : Senin, 04 Mei 2026  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 2

## AMBANG BATAS PARLEMEN

# Parpol Belum Satu Suara

**JAKARTA, KOMPAS** — Partai-partai politik belum satu suara soal penetapan ambang batas parlemen. Sebagian memperbahakan ambang batas parlemen 4 persen, sebagian lainnya mengusulkan agar dinaikkan, sebagian lagi mengusulkan agar diturunkan. Terjadi tarik-menarik kepentingan masing-masing partai terkait dampak penerapan ambang batas itu.

Dari pemilu ke pemilu, angka ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* terus naik. Pada Pemilu 2009, misalnya, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen. Angka itu naik menjadi 3,4 persen pada Pemilu 2014 dan 4 persen pada Pemilu 2019 serta Pemilu 2024.

Namun, pada 29 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas 4 persen sebagai konstitusional bersyarat. Putusan yang dibacakan dua pekan setelah pemungutan suara Pemilu 2024 itu juga menyebutkan, angka 4 persen tidak bisa dipatok secara permanen tanpa dasar yang jelas.

Oleh karena itu, melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, MK memerintahkan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk merumuskan ulang angka ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029. Dalam menetapkan ambang batas, DPR dan pemerintah harus berpedoman pada metode serta kriteria rasional yang telah ditetapkan MK. Ambang batas tidak boleh lagi menjadi kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang diputuskan tanpa dasar metode dan argumen yang jelas.

Mengacu hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan PBB Yusril Itha Mahendra pada Rabu (29/4/2026) melontarkan usulan agar syarat raihan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen disesuaikan

dengan jumlah komisi di DPR. "Misalnya, yang dijadikan acuan adalah berapa komisi yang ada di DPR. Itu sekarang diatur dalam tata tertib, seharusnya diatur dalam undang-undang," katanya.

PBB merumuskan ambang batas parlemen dihitung berdasarkan rasio jumlah komisi dengan total kursi di DPR. Jika saat ini terdapat 13 komisi dengan total 580 kursi, muncul angka 2,24 persen. Secara matematis, angka ini dipandang cukup untuk menjamin keterwakilan minimal di seluruh komisi di DPR.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, ide menjadikan 13 komisi di DPR sebagai formula menghitung ambang batas parlemen merupakan hal yang menarik untuk didiskusikan. Namun, jika ambang batas diturunkan menjadi 2,24 persen, jumlah partai di DPR bisa bertambah menjadi 10-12 partai.

"Semakin besar jumlah partai politik di parlemen, biasanya *representativeness* (tingkat keterwakilan) membaik karena suara masyarakat terserap lebih luas. Namun, di sisi lain, *governability* (tata kelola pemerintahan) cenderung kian kompleks," ujarnya.

Ia menilai, ambang batas parlemen dalam rentang 3,5 persen hingga 4,5 persen termasuk cukup ideal karena keterwakilan dan tata kelola pemerintahan cukup terwadahi. Sementara Partai Demokrat masih mengkaji apakah akan mempertahankan ambang batas parlemen 4 persen atau menaikkan menjadi maksimal 5 persen. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menyatakan, penentuan angka ambang batas mempertimbangkan jumlah alat kelengkapan DPR (AKD).

"Jika ada 13 AKD, minimal harus ada dua anggota di sana, jadi sekitar 26 orang (minimal

per partai)," katanya saat dihubungi, Minggu (3/5).

Partai Golkar dan Partai Nasdem juga tengah menghitung angka ideal ambang batas parlemen. Golkar menilai, angka ideal berada di rentang 4 persen hingga 6 persen, sedangkan Nasdem mengusulkan kenaikan di kisaran 5,5 persen-7 persen.

### Kritik Megawati

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengkritik lambannya proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Ia juga menyoroti soal potensi pengambilalihan inisiatif revisi UU Pemilu oleh pemerintah, yang dinilainya sebagai ketidakconsistenan negara mengingat revisi itu dalam Program Legislasi Nasional merupakan usul inisiatif DPR.

Ia pun mempertanyakan, revisi UU Pemilu dilakukan untuk rakyat atau kepentingan pihak tertentu. "Urusan pemilu yang akan datang. Saya, tuh, sampai *mikir*, ini *bener* buat rakyat atau buat *sopo*, toh? Iya, loh, karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini katanya mau diambil oleh pemerintah. Loh, saya bilang, kok, diambil oleh pemerintah. Menunjukkan bahwa, ya, itu keadaan sekarang ini, kok, menurut saya yang saya sebut yaitu *poco-poco* tadi," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Emeritus Universitas Borobudur Arief Hidayat, di Jakarta, Sabtu (2/5).

Adapun Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpandangan, DPR tetap harus menyelesaikan draf RCU Pemilu secepatnya.

"Lebih baik pembahasan di DPR karena diusulkan secara bersama oleh banyak partai," ujar Arya. (DYT/RTG/SYA)